

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2001, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kuper Adam & Yessica, 2000, “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”. PT. Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rasyid M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta, Bandung. 2009.
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Situmorang, M, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Afabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Administrasi Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bndung, PT Refika Aditama.
- Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Djembatan. Jakarta.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.

Wahyudi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Wasistiono, Sadu. 2006. *Prospek pengembangan Desa*. Fokus Media. Bandung.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*, Bulat Dan Utuh, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Pekanbaru, Universitas Islam Riau Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.